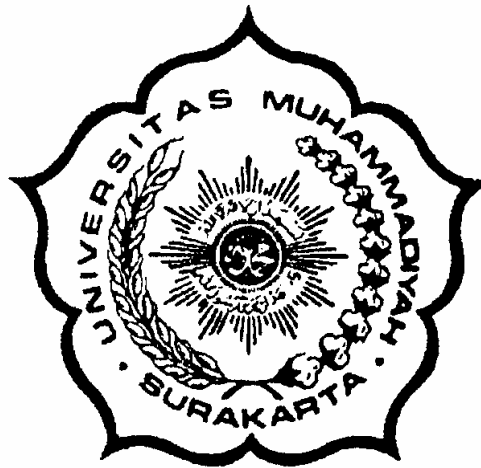


**PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA
(Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jawa Tengah dari
tahun 2009 -2011)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat–Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

WIDYA JAYANTI

B 200 080 228

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
“PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009 -2011)”.

Yang ditulis oleh:

WIDYA JAYANTI

B 200 080 228

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2013

Pembimbing

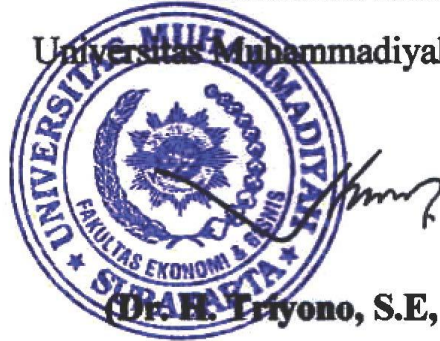


(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. H. Triyono, S.E, M.Si)

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA

**WIDYA JAYANTI
B. 200 080 228**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan sebagai informasi untuk mengetahui faktor apa saja dalam keuangan daerah yang dapat mempengaruhi Pendapatan per Kapita.

Metode analisis data yang digunakan untuk menentukan pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (*Adj. R²*). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah, dengan metode *purposive sampling* Jenis Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2009 hingga 2011 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,681 dengan $p= 0,032 < 0,05$. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,321 dengan $p= 0,023 < 0,05$. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh F_{hitung} sebesar 59,070 dengan $p= 0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan per Kapita.

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu mendorong demokratisasi di daerah, mencegah disintegrasi bangsa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, memajukan dan meningkatkan daya saing daerah, mendekatkan pelayanan kepada publik, dan memberdayakan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar (Ardhani, 2011).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat ikut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor tersebut,

produktifitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007).

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), namun demikian, indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu Pendapatan per Kapita yang dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah pertama, pengaruh belanja modal terhadap pendapatan per kapita. Kedua, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pendapatan per kapita. Ketiga, pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan per kapita.

B. LANDASAN TEORI

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 79 undang-undang no. 22 tahun 1999, pendapatan daerah yaitu semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi hak atas daerah yang menjelaskan tentang jumlah anggaran dan realisasi dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, bagian Pendapatan asli daerah, pendapatan dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah ini dimaksud untuk membiayai belanja atau pengeluaran pembangunan daerah, karena pembangunan daerah tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan yang dana yang cukup.

Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam UU No.33/ 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam

rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar masyarakat pun cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Kuncoro, 2004).

Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Todaro (2006) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu daerah untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu daerah, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

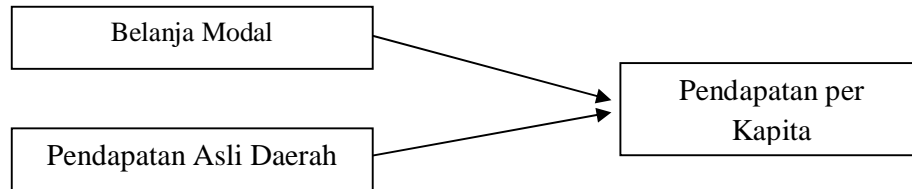
Hipotesis

H1: Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita.

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita

H3: Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita.

Kerangka Model :



C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Jateng (www.jateng.bps.go.id) melalui internet yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 Kabupaten dan Kota. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2011. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan keuangan Pemerintah daerah tahun 2009-2011. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penelitian ini variabel independen adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel dependen adalah Pendapatan per Kapita.

Metode Analisis Data

Persamaan regresi berganda pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 PAD + b_2 BM + e$$

D. HASIL PENELITIAN

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji t Belanja modal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,321 dengan $p= 0,023$. Oleh karena $p= 0,023 < 0,05$; maka H_1 diterima, artinya Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,681 dengan $p= 0,032$. Oleh karena $p= 0,032 < 0,05$; maka H_2 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 59,070 dengan $p= 0,000$. Oleh karena $p= 0,000 < 0,05$; maka H_3 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan Hipotesis

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk belanja modal (b_2) adalah -0,00001 dengan berparameterkan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Belanja Modal sebesar 1%, akan mempengaruhi terhadap penurunan Pendapatan per Kapita sebesar 0,00001%. Belanja Modal diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,321 dengan $p= 0,023$. Oleh karena $p= 0,023 < 0,05$; maka H_1 diterima, artinya Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (b_1) adalah 0,00004 dengan berparameterkan positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1%, akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan per Kapita sebesar 0,00004%. Hasil uji t untuk variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,681 dengan $p= 0,032$.

Oleh karena $p= 0,032 < 0,05$; maka H_2 diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Harianto dan Adi (2007), menyatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga Pendapatan per Kapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif diharapkan akan meningkatkan Pendapatan per Kapita.

Hasil perhitungan koefisien determinasi ($Adj. R^2$) diperoleh nilai sebesar 0,561. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan pada Pendapatan per Kapita penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 56,1% disebabkan oleh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 59,070 dengan $p= 0,000$. Oleh karena $p= 0,000 < 0,05$; maka H_3 diterima, artinya Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -2,321 dengan $p= 0,023 < 0,05$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien bernilai negatif, hal ini berarti jika Belanja Modal mengalami peningkatan, maka Pendapatan per Kapita akan mengalami penurunan, sebaliknya jika Belanja Modal menurun, maka Pendapatan per Kapita akan mengalami peningkatan.

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,681 dengan $p= 0,032 < 0,05$. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif, artinya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, maka Pendapatan per Kapita juga akan mengalami peningkatan, sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan maka Pendapatan per Kapita juga akan mengalami penurunan.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan per Kapita penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan diperoleh F_{hitung} sebesar 59,070 dengan $p= 0,000 < 0,05$, artinya bahwa meningkatnya belanja modal dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pendapatan per Kapita daerah juga akan mengalami peningkatan.

Saran

Dari hasil penelitian, analisis data pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel dan daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu tidak pada Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi penelitian mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan per Kapita daerah seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah dan variabel-variabel lainnya.
3. Bagi penelitian mendatang hendaknya periode penelitian lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya tiga tahun, sehingga tingkat generalisasinya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi(SNA) X, Makassar.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Edisi 5 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Padang.
- Juliawati, Ebit, dkk. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flaypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX, Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah*.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- _____. 2008. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal*.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Media Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Hal. 109-123.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Upaya-upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.
www.kardin-indonesia.or.id
- Todaro. Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 9. Jilid 1. Jakarta: PT. Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- Walidi. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
www.djpk.depkeu.go.id
www.jateng.bps.go.id